

**PENGEMBANGAN MODEL KETAHANAN NASIONAL MELALUI
INTEGRASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DAN PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN DI KALANGAN SISWA SMA
SE KABUPATEN KONAWE**

Hamuni

*Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP Universitas Halu Oleo Kendari
Sulawesi Tenggara, Indonesia. E-mail: hamunifarid@yahoo.co.id*

dan

Karsadi

*Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP Universitas Halu Oleo Kendari
Sulawesi Tenggara, Indonesia*

Abstrak: Salah satu alternatif yang dilakukan untuk “memotong mata rantai” perilaku korup yang dilakukan para pejabat negara di daerah dan pejabat di daerah adalah dengan membuat kantin kejujuran. Melalui kerjasama antara Pemerintah Daerah, Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Tenggara dengan pihak sekolah dibangun beberapa kantin kejujuran dengan tujuan untuk membangun karakter siswa dan guru serta tenaga administrasi sekolah untuk berperilaku jujur dan hal ini dimulai dari perilaku sehari-hari di dalam melakukan transaksi di kantin kejujuran. Di beberapa sekolah di Kabupaten Konawe kantin yang ada di dalam lingkungan tersebut diberi nama kantin “kejujuran”. Pada awalnya kantin kejujuran tersebut dapat apresiasi dan tanggapan positif dari siswa, guru, dan tenaga administrasi di sekolah tersebut, akan tetapi lama kelamaan kantin kejujuran tersebut tidak berjalan karena para siswa sudah mulai tidak jujur. Dengan kata lain, untuk “memotong mata rantai perilaku korup di sekolah” tidak cukup hanya dengan membangun kantin kejujuran saja, karena hasilnya ternyata tidak jujur. Untuk itu diperlukan model lain untuk menciptakan perilaku jujur di sekolah, terutama bagi siswa, yaitu dengan memberikan pendidikan antikorupsi yang dikemas dan diintegrasikan dengan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, sehingga tercipta ketahanan nasional yang tangguh.

Kata Kunci: Ketahanan Nasional, Pendidikan Antikorupsi, Revitalisasi Pendidikan Kewarganegaraan, dan siswa SMA

PENDAHULUAN

Menurut Transparency Internasional Indonesia, IPK yang rendah menunjukkan bahwa pelaku bisnis melihat pemerintah daerah tidak seirius dalam usaha memberantas korupsi, sehingga hasil survei ini juga dapat diidentikan dengan urutan Pemda terkorup di Indonesia. Urutan IPK 50 kota yang telah disurvei TII tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 50 Kota di Indonesia Menurut Transparency International, 21 Januari 2009.

No.	Kota	Skor IPK	No.	Kota	Skor IPK
1	2	3	4	5	6
1.	Yogyakarta	6,43	26.	Batam	4,44
2.	Palangkaraya	6,10	27.	Sorong	4,39
3.	Banda Aceh	5,87	28.	Tenggarong	4,38
4.	Jambi	5,57	29.	Tanjung Pinang	4,35
5.	Mataram	5,41	30.	Ambon	4,32

1	2	3	4	5	6
6.	Surakarta	5,35	31.	Surabaya	4,26
7.	Tasikmalaya	5,12	32.	Denpasar	4,25
8.	Banjarmasin	5,11	33.	Sibolga	4,25
9.	Samarinda	5,03	34.	Lhokseumawe	4,14
10.	Pangkal Pinang	5,03	35.	Mamaju	4,08
11.	Ternate	5,01	36.	Jakarta	4,06
12.	Jayapura	5,01	37.	Manado	3,98
13.	Malang	5,00	38.	Pematang Siantar	3,96
14.	Jember	4,96	39.	Palembang	3,87
15.	Kediri	4,9	40.	Medan	3,84
16.	Balikpapan	4,86	41.	Cirebon	3,82
17.	Gorontalo	4,83	42.	Pontianak	3,81
18.	Makasar	4,7	43.	Bandung	3,67
19.	Padang	4,64	44.	Padang Sidempuan	3,66
20.	Sampit	4,6	45.	Pekanbaru	3,55
21.	Semarang	4,58	46.	Purwokerto	3,54
22.	Bandar Lampung	4,58	47.	Kendari	3,43
23.	Serang/Cilegon	4,57	48.	Manokwari	3,39
24.	Palu	4,5	49.	Tegal	3,32
25.	Bengkulu	4,46	50.	Kupang	2,97

Sumber : Andrianto, *et al.* (2010)

Data lainnya mengungkapkan bahwa kasus-kasu tindak pidana korupsi di negara Indonesia tidak hanya dilakukan oleh oknum-oknum di lembaga pemerintahan (eksekutif) saja, melainkan juga terjadi di parlemen (legislatif) dan di lembaga peradilan (yudikatif). Setelah beberapa bupati, walikota, dan gubernur ditangkap oleh KPK, terjadi penangkapan oknum parlemen (DPR dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota) oleh KPK. Pelaku korupsi tersebut telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan. Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gerak) mencatat data di KPK bahwa terdapat kasus dugaan korupsi yang dilakukan gubernur sebanyak 7 kasus, bupati/walikota sebanyak 60 kasus, DPRD Provinsi 324 kasus, dan DPRD Kabupaten/Kota sebanyak 738 kasus (Dharma Kesuma *et al.*, 2009).

Pejabat Publik mulai dari pusat sampai di daerah-daerah terseret oleh kasus korupsi. Data menunjukkan bahwa selama tahun 2007 saja, 7 gubernur dan 3 wakil gubernur tersangkut kasus korupsi. Selain itu, terdapat 62 bupati/walikota juga tersangkut korupsi dan sudah dijatuhi hukuman karena terbukti bersalah. Sementara pada periode sebelumnya sampai dengan Maret 2006, terdapat tidak kurang 1.100 pejabat pemerintah terlibat dalam kasus korupsi, yaitu 7 orang gubernur, 60 orang bupati/walikota, 8 orang kepala daerah, 327 orang anggota DPRD Provinsi, dan 735 orang anggota DPRD Kabupaten/Kota (Andrianto, *et al.*, 2010).

Perilaku korup dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan para pejabat dan elit seharusnya tidak perlu terjadi kalau selama dalam proses pembelajaran di sekolah dan di kampus diberikan materi pendidikan antikorupsi yang terintegrasi

ke dalam pendidikan kewarganegaraan. Dengan kata lain, sejak anak-anak usia dini sampai mahasiswa, sekolah dan kampus harus memberikan bekal pengetahuan mengenai materi pendidikan antikorupsi yang diintegrasikan ke dalam pendidikan kewarganegaraan, terutama di perguruan tinggi. Untuk memberikan bekal materi antikorupsi tersebut, maka para guru dan dosen dapat menyajikan ke dalam proses pembelajaran yang berbasis pada masalah (*problem based learning*), pembelajaran kontekstual (*kontekstual teaching learning*) dengan metode simulasi dan bermain peran (*role playing*), dan pembelajaran berbasis proyek (*project based learning*) (Djahiri, 2006; Suryadi, 2006).

Pemilihan model pembelajaran antikorupsi dalam perkuliahan sangat penting karena bagi mahasiswa pembelajaran antikorupsi merupakan bagian penting dari pendidikan karakter, yang dapat diejawantahkan melalui pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Menurut Dharma Kesuma *et al.* (2009) menyebutkan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah sebuah pilihan yang sewajarnya untuk memadukan material yang tertuju pada korupsi, *good governance*, akuntabilitas, dan transparansi dalam kehidupan publik. Di kelas satu Sekolah Dasar, para siswa dibelajarkan untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka, dengan mengupayakan izin ketika terlambat ke sekolah. Siswa juga diajarkan bagaimana mengelola suatu anggaran belanja, belajar contoh mengenai *good governance* yang konkrit, pengembangan buku ajar, dan lain-lain.

Dalam perpektif pendidikan, jalur pendidikan merupakan jalur strategis dalam pembinaan karakter bangsa yang kuat. Melalui jalur pendidikan ini kita dapat melakukan pembangunan karakter bangsa (*character building*) kepada anak-anak bangsa mengenai tanggung jawab sosial seseorang terhadap bangsa, negara, dan kekayaan negara. Pendidikan antikorupsi merupakan upaya sadar dan sistematis dalam membangun generasi muda yang bertanggung jawab dan nasionalis. Melalui jalur pendidikan formal dan non formal, pendidikan antikorupsi diharapkan dapat dijadikan bagian dari pencerahan sekaligus penyadaran terhadap anak bangsa ini, karena sesungguhnya tanpa kesadaran penuh terhadap nilai moral, maka apapun dapat dijadikan potensi korup (Teten Masduki, 2009).

Melalui pendidikan antikorupsi pembangunan karakter bangsa yang kuat, mandiri, berkualitas serta sehat akan dapat diwujudkan demi masa depan Indonesia. Walaupun dalam proses implementasinya, harus tetap kritis, sebab dunia pendidikan juga tidak luput dari tindak pidana korupsi (Teten Masduki, 2009). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran pendidikan antikorupsi merupakan salah satu bentuk upaya untuk mencegah perilaku korup mulai sejak usia dini sampai mahasiswa. Melalui jalur pendidikan, karakter dan perilaku yang menjunjung tinggi kejujuran dapat dibentuk sejak usia dini sampai mahasiswa, yang kelak nanti akan menjadi abdi negara, pejabat, dan pemimpin.

Pertanyaan dalam penelitian ini adalah apakah materi pembelajaran tentang antikorupsi di dalam kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan selama ini sudah memadai dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran bagi siswa SMA di Kabupaten Konawe ? apakah dengan mengintegrasikan dan memperdalam substansi kajian atau materi pembelajaran pendidikan antikorupsi ke dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dapat menjadi strategi baru untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran bagi siswa SMA tersebut ?

Tujuan khusus penelitian ini adalah: a) Menganalisis substansi kajian dan materi pembelajaran pendidikan antikorupsi yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, b) Menemukan suatu model pembelajaran pendidikan antikorupsi dalam membangun karakter siswa SMA yang diintegrasikan ke dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan melalui *integrated model of Uncorruption and Civic Education*, c) Mendesain bahan ajar pembelajaran pendidikan antikorupsi terintegrasi ke dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada siswa di SMA, d) Membantu pemerintah, agar model pembelajaran pendidikan antikorupsi tersebut dapat menjadi salah satu alternatif dan jawaban untuk mengatasi perilaku korup dan ketidakjujuran yang dikhawatirkan dilakukan oleh siswa di sekolah dan kelak kalau menjadi pejabat penyelenggara negara dan pemerintahan.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian di beberapa SMA di Kabupaten Konawe, baik SMA negeri maupun SMA swasta di Kabupaten Konawe. Pemilihan lokasi ini dengan pertimbangan akademis bahwa di beberapa SMA tersebut sudah dibangun kantin-kantin kejujuran untuk menanamkan nilai kejujuran kepada siswa SMA, tetapi faktanya masih ditemukan siswa SMA yang tidak jujur didalam bertransaksi di kantin tersebut.

Untuk mencapai tujuan dan mempertimbangkan ruang lingkup penelitian yang akan dilakukan, maka pendekatan yang digunakan adalah *participatory approach*. Pendekatan partisipatoris ini meletakkan siswa dan guru bukan sebagai objek penelitian, tetapi aktif mempengaruhi proses penelitian yang partisipatif.

Penelitian ini menggunakan metode "*field research*" dengan memfokuskan pada model aplikatif pendidikan antikorupsi yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMA. Pengumpulan data dilakukan melalui Diskusi Kelompok Terfokus (*Focus Groups Discussion*, FGD), observasi partisipasi (*participation observation*), serta wawancara mendalam (*indepth interviews*).

Pengumpulan data melalui *Focus Groups Discussion* (FGD) akan dilakukan terhadap *stake-holders* pada tingkat sekolah, pengawas, dan Dinas Pendidikan Kecamatan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe. Dalam diskusi kelompok terfokus ini unsur-unsur yang terlibat antara lain : siswa, guru, kepala sekolah, kepala UPT Pendidikan Kecamatan, Dewan Pendidikan Kabupaten Konawe, PGRI, dan unsur pengawas sekolah serta perguruan tinggi dan LSM antikorupsi di Kabupaten Konawe.

Pengumpulan data melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) akan dilakukan terhadap ketua lembaga-lembaga kesiswaan (OSIS, dll) di sekolah, kepala sekolah, kepala dinas, pengurus PGRI dan IGI Kabupaten Konawe, dan ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Konawe.

Sesuai dengan pendekatan yang digunakan, analisis data menggunakan analisis deskriptif-eksplanatif. Sebagaimana analisis data kualitatif, analisis ini terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan dan jalin menjalin satu dengan yang lainnya, yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Analisis ini tidak perlu berurutan, melainkan tergantung pada kebutuhan penelitian.

PEMBAHASAN MASALAH**Analisis Terhadap Kompetensi Dasar, Materi Pembelajaran, dan Indikator Pendidikan Antikorupsi Terintegrasi Dengan Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMA****Kelas dan Semester : X/1**

Standar Kompetensi : 3. Menampilkan sikap kejujuran dan anti korupsi, serta konsep dasar korupsi		
KOMPETENSI DASAR	Materi Pembelajaran	Indikator
1. Menampilkan nilai-nilai kejujuran sesuai dengan Pancasila	Nilai-nilai Kejujuran dalam kehidupan sehari-hari : 1. Nilai-nilai Kejujuran di lingkungan keluarga 2. Nilai-nilai kejujuran di lingkungan sekolah 3. Nilai-nilai kejujuran di lingkungan masyarakat	1. Menunjukkan contoh nilai-nilai kejujuran yang diterapkan di lingkungan keluarga 2. Menunjukkan contoh nilai-nilai kejujuran yang dite-rapkan di lingkungan sekolah 3. Menunjukkan contoh nilai-nilai kejujuran yang dite-rapkan di lingkungan masyarakat
2. Menampilkan sikap anti korupsi di kalangan PNS, aparat penegak hukum, dan masyarakat	Sikap anti korupsi : 1. Konsep <i>good and clean government</i> 2. Aparat penegak hukum yang profesional 3. Sikap masyarakat yang menjauhi perbuatan yang masuk kategori korupsi	1. Menunjukkan contoh sikap anti korupsi 2. Menunjukkan contoh gerakan/organisasi anti korupsi 3. Menganalisis macam-macam perbuatan anti korupsi 4. Menampilkan sikap anti korupsi 5. Menunjukkan contoh perbuatan PNS yang tidak masuk katgori korupsi 6. Menunjukan contoh perilaku aparat penegak hukum yang jauh dari korupsi
3. Menganalisis konsep dasar korupsi dan rumusan korupsi menurut peraturan perundang-undangan	Konsep dasar korupsi : 1. Pengertian korupsi 2. Ciri-ciri korupsi 3. Rumusan tindak pidana korupsi menurut peraturan perundang-undangan 4. Pelaku korupsi (koruptor) di Indonesia	1. Menguraikan pengertian korupsi 2. Mengidentifikasi ciri-ciri perbuatan yang masuk kategori korupsi 3. Mendeskripsikan rumusan tindak pidana korupsi menurut peraturan perundang-undangan

Kelas/Semester : XI/1

Standar Kompetensi : 1. Menganalisis penyebab terjadinya korupsi dan modus operandinya		
KOMPETENSI DASAR	Materi Pembelajaran	Indikator
1. Mendeskripsikan faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi	Penyebab terjadinya korupsi : 1. Faktor internal pelaku korupsi dan kebobrokan moral 2. Faktor eksternal di luar pelaku korupsi (manajemen pemerintahan, aparat penegak hukum, peraturan perundang-undangan, pengawasan dan pengendalian dll)	1. Mendeskripsikan faktor internal penyebab terjadinya korupsi (internal pelaku/(koruptor) 2. Mengidentifikasi faktor eksternal penyebab terjadinya korupsi (berasal dari eksternal pelaku) 3. Mendeskripsikan dampak manajemen pemerintahan yang buruk terhadap meningkatnya kasus korupsi 4. Menguraikan lemahnya aparat penegak hukum untuk menghindari korupsi 5. Menunjukkan contoh perbuatan pejabat negara yang terseret kasus korupsi 6. Menyimpulkan penyebab korupsi secara umum
2. Menganalisis modus operandi korupsi di Indonesia	Modus operandi korupsi di Indonesia : 1. Modus operandi korupsi di kalangan eksekutif 2. Modus operandi korupsi di kalangan aparat penegak hukum dan judikatif 3. Modus operandi korupsi di kalangan legislatif 4. Modus operandi korupsi di kalangan pengusaha dan masyarakat	1. Mendeskripsikan modus operandi korupsi di kalangan eksekutif 2. Mendeskripsikan modus operandi korupsi di kalangan aparat penegak hukum dan judikatif 3. Mendeskripsikan modus operandi korupsi di kalangan legislatif 4. Mendeskripsikan modus operandi korupsi di kalangan pengusaha dan masyarakat 5. menyimpulkan modus operandi korupsi yang melibatkan secara bersama-sama pejabat, pengusaha, dan aparat penegak hukum
3. Menganalisis anatomi korupsi dan data korupsi di Indonesia	Anatomi korupsi dan data korupsi di Indonesia : 1. Anatomi korupsi di	1. Mendeskripsikan anatomi korupsi di Indonesia 2. Menganalisis dinamika

	<p>Indonesia</p> <p>2. Dinamika korupsi di Indonesia</p> <p>3. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia</p>	<p>kasus korupsi di Indonesia sejak awal kemerdekaan sampai saat ini</p> <p>3. Mendeskripsikan jumlah kasus korupsi di Indonesia</p> <p>4. Menganalisis IPK di berbagai daerah di Indonesia</p>
<p>4. Menganalisis hubungan korupsi dengan kemiskinan dan keterbelakangan</p>	<p>Korupsi dan kemiskinan di Indonesia :</p> <p>1. Tipe dan karakteristik korupsi insidental</p> <p>2. Tipe dan karakteristik korupsi yang sistematis</p> <p>3. Tipe dan karakteristik korupsi yang sistemik</p> <p>4. Dampak korupsi terhadap kesejahteraan masyarakat</p> <p>5. Dampak korupsi terhadap degradasi moral bangsa</p> <p>6. Dampak korupsi terhadap stabilitas daerah dan nasional</p>	<p>1. Menunjukkan contoh tipe dan karakteristik korupsi yang insidental</p> <p>2. Menunjukkan contoh tipe dan karakteristik korupsi yang sistematis</p> <p>3. Memberikan contoh tipe dan karakteristik korupsi yang sistemik</p> <p>4. Menganalisis dampak korupsi terhadap kesejahteraan masyarakat</p> <p>5. Menganalisis dampak korupsi terhadap degradasi moral bangsa</p> <p>6. Menganalisis dampak korupsi terhadap stabilitas daerah dan nasional</p>

Kelas dan Semester : XII/2

Standar Kompetensi : 3. Menganalisis pencegahan dan pemberantasan, serta penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi		
KOMPETENSI DASAR	Materi Pembelajaran	Indikator
<p>1. Menganalisis pencegahan dan pemberantasan korupsi</p>	<p>Pencegahan dan pemberantasan korupsi :</p> <p>1. Pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi</p> <p>2. Pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui media massa</p> <p>3. Pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui perubahan dan pembaharuan peraturan perundang-undangan</p>	<p>1. Menganalisis pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi</p> <p>2. Mendeskripsikan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui media massa</p> <p>3. Menganalisis pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui perubahan dan pembaharuan peraturan perundang-undangan</p>

	4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pengawasan dan partisipasi masyarakat dan aktivis penggiat anti korupsi	4. Mendeskripsikan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui kepedulian dan partisipasi masyarakat untuk melawan korupsi
2. Menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi (koruptor)	<p>Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aparat penegak hukum yang jujur, bersih, dan profesional 2. Penegakan hukum terhadap koruptor yang adil dan tidak diskriminatif (<i>equality before the law</i>) 3. Penegakan hukum terhadap kasus korupsi yang mandiri dan bebas dari intervensi politik 4. Strategi penegakan hukum terhadap kasus korupsi oleh KPK 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menunjukkan contoh aparat penegak hukum yang jujur, bersih, dan profesional 2. Mendeskripsikan penegakan hukum terhadap koruptor yang menerapkan prinsip <i>equality before the law</i> 3. Menganalisis penegakan hukum terhadap kasus korupsi yang mandiri dan bebas dari intervensi politik 5. Menunjukkan contoh strategi penegakan hukum terhadap kasus korupsi oleh KPK
4. Menganalisis peranserta publik untuk melawan korupsi di Indonesia	<p>Peranserta publik untuk melawan korupsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peranserta LSM (ICM, Pukat UGM, dll) untuk melawan korupsi 2. Peranserta masyarakat, rohaniawan, tokoh-tokoh nasional untuk melawan korupsi 3. Peranserta akademisi (dosen dan mahasiswa) untuk melawan korupsi 4. Peranserta organisasi sosial kemasyarakatan, sosial ke-agamaan, dan organisasi sosial kemasyarakatan lainnya untuk melawan korupsi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menganalisis peranserta LSM/NGO untuk melawan korupsi 2. Mendeskripsikan peran-serta masyarakat, rohaniawan, tokoh-tokoh nasional untuk melawan korupsi 3. Menunjukkan contoh peran akademisi (dosen dan mahasiswa) untuk melawan korupsi 4. Menunjukkan contoh peranserta organisasi sosial kemasyarakatan, sosial ke-agamaan, dan organisasi sosial kemasyarakatan lainnya untuk melawan korupsi 5. Menyimpulkan peranserta publik untuk mencegah, memberantas, dan melawan perilaku yang korup di Indonesia

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dijelaskan sebelumnya, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Pendidikan antikorupsi tidak perlu berdiri sendiri sebagai sebuah mata pelajaran yang diajarkan bagi siswa SMA, akan tetapi cukup diintegrasikan ke dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Esensi dan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan dan pendidikan antikorupsi adalah menanamkan nilai-nilai kejujuran.
2. Untuk mengintegrasikan pendidikan antikorupsi ke dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, maka diperlukan analisis substansi kajian yang meliputi kompetensi dasar, materi pembelajaran, dan indikator pendidikan antikorupsi dengan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMA.
3. Dalam Pembelajaran pendidikan antikorupsi yang terintegrasi dengan Pendidikan Kewarganegaraan bagi siswa SMA dibutuhkan model dan metode pembelajaran yang berbasis masalah (*problem based learning*) dan pembelajaran kontekstual (*kontekstual teaching learning*) yang disajikan melalui diskusi, debat, studi kasus, *role playing*, dll.
4. Dalam Pembelajaran pendidikan antikorupsi yang terintegrasi dengan Pendidikan Kewarganegaraan bagi siswa SMA dibutuhkan media pembelajaran yang berbasis informasi dan teknologi (IT), seperti video, animasi, *power point*, dan lain-lain.

Saran-Saran

1. Untuk menanamkan sikap kejujuran tidak cukup dengan membelajarkan Pendidikan Kewarganegaraan saja, tetapi perlu terintegrasi dengan pendidikan antikorupsi bagi para siswa SMA. Hal ini penting mengingat eksistensi pendidikan sesungguhnya adalah menumbhembangkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, keadilan, etika, dan lain-lain.
2. Untuk mempersiapkan pembelajaran pendidikan antikorupsi yang terintegrasi dengan Pendidikan Kewarganegaraan dibutuhkan diskusi dan sharing serta lokakarya antarguru yang mengampu mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan mengaktifkan wadah musyawarah guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (MGMP PKn).
3. Pemilihan model dan metode pembelajaran pendidikan antikorupsi yang terintegrasi dengan Pendidikan Kewarganegaraan sangat penting supaya substansi kajian dan materi tepat sasaran dan mudah dipahami dan dimengerti oleh para siswa SMA dengan menerapkan pembelajaran berbasis masalah (*problem based learning*) dan pembelajaran kontekstual (*contextual teaching and learning*).
4. Diperlukan pelatihan bagi guru-guru SMA yang mengampu mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk menyamakan persepsi substansi, model dan metode pembelajaran serta evaluasi terhadap penerapan pembelajaran pendidikan antikorupsi terintegrasi dengan Pendidikan Kewarganegaraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, Nico dan Ludy Prima Johansyah. 2010. *Korupsi di Daerah : Modus Operandi dan Peta Jalan Pencegahannya*. Surabaya : Putra Media Nusantara.
- Djahiri, A. Kosasih. 2006. *Strategi Pembelajaran Berbasis Nilai, Moral, dan Agama Dalam Pendidikan Persekolahan*. (dalam Pendidikan Nilai Moral Dalam Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung : Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) FPIPS-UPI.
- Kesuma, Dharma, *et al.* 2009. *Korupsi dan Pendidikan Antikorupsi*. Bandung : Pustaka Aulia Press.
- Masduki, Teten. 2009. *Pengantar : Pendidikan Antikorupsi*. (dalam Korupsi dan Pendidikan Antikorupsi). Bandung : Pustaka Aulia Press.
- Suryadi, Ace, 2006. *Model Pembelajaran Alternatif Menuju Reformasi Pembelajaran (School Reform)*, dalam Pendidikan Nilai Moral Dalam Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung : Laboratorium PKn